



RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkan Renana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 ini, diharapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Batang, 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG

dr. DIDIET WISNUHARDANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19730619 200604 1 013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan	82
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	96
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	101
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	126
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN	127
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	127
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ...	130
3.3. Program dan Kegiatan	144
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan	165
BAB V PENUTUP	166

LAMPIRAN TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 mengacu pada perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang untuk memecahkan

permasalahan pembangunan daerah bidang kesehatan secara terencana melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 diintegrasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam menjalankan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah. Selanjutnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang;

15. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Kabupaten Batang 2023 – 2026;
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2023.

2. Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan di bidang kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumberdaya yang ada.
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang dalam pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Dinas Kesehatan, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Dinas Kesehatan serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2021

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan tahun 2021 dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan kesehatan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RENJA Tahun 2023

Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran Dinas Kesehatan yang direncanakan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Dalam bab ini menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 5) pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- 6) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
- 7) pengelolaan sumberdaya kesehatan;

- 8) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 9) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- 11) pengelolaan perijinan bidang kesehatan;
- 12) pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;
- 13) peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan;
- 14) penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;
- 15) pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- 16) pengembangan manajemen bidang kesehatan;
- 17) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- 18) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang kesehatan;
- 19) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- 20) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Kesehatan;
- 21) pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta; dan
- 22) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

2. Organisasi dan Tatakerja

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 - 1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Kejadian Luar Biasa;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Sumberdaya Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sumberdaya Dinas Kesehatan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang :

a. Berdasarkan unit eselon/jabatan

Eselon II b	: 1
Eselon III a	: 1
Eselon III b	: 3
Eselon IV a	: 11
Eselon IV b	: 2

b. Berdasarkan Bagian/Bidang/UPTD

Kepala Dinas	: 1
Sekretariat	: 29
Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan	: 18
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	: 21
Bidang Kesehatan Masyarakat	: 16
UPT Dinas Instalasi Gudang Farmasi	: 9
UPT Dinas Laboratorium Daerah	: 10
UPT Pusk (termasuk PTT dan kontrak)	: 1.190

Sumberdaya manusia kesehatan di Kabupaten Batang (Dinas Kesehatan, Puskesmas) berdasarkan jenis tenaga kesehatan:

Tenaga Medis :

- Dokter Umum	: 43
- Dokter Gigi	: 13

Tenaga Paramedis :

- Perawat	: 232
- Bidan	: 513
- Perawat gigi	: 29

Tenaga Kefarmasian :

- D III Farmasi/AA	: 19
- Apoteker	: 13

Tenaga Gizi : 35

Tenaga Kesehatan Masyarakat : 23

Tenaga Sanitasi : 30

Tenaga Teknis Medis :

- Pranata Laborat	: 26
- Rekam medis	: 4

2. Sarana Pelayanan Kesehatan

Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang hampir merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan

jenis sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang, yaitu :

a. Rumah Sakit Pemerintah	: 2	Swasta	: 1
b. Puskesmas dengan Rawat Inap	:		4
c. Puskesmas Rawat Jalan	:		17
d. Puskesmas Pembantu	:		42
e. Puskesmas Keliling/Ambulan	:		59
f. Poliklinik Kesehatan Desa	:		184
g. Instalasi Farmasi	:		1
h. Laboratorium Kesehatan Daerah	:		1
i. Balai Pengobatan/klinik	:		22
j. Apotik	:		71
k. Toko Obat	:		6
l. Praktek Dokter Perorangan	:		150
m. Praktek Pengobatan Tradisional	:		20
n. Unit Tranfusi Darah	:		0
o. Posyandu	:		1.230

C. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2021 maka capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan tahun 2021 berdasarkan tingkat realisasi/penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

Pendapatan asli daerah dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah di Laboratorium Kesehatan dan BLUD UPTD Puskesmas dari target yang ditetapkan Rp.38.313.613.462,- pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp39.478.342.155,- (103,04%).

Sedangkan untuk anggaran belanja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas tahun 2021 sebesar Rp.208.533.537.048,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.188.362.631.072,00,- dengan realisasi Rp.162.081.216.212,00 (86,05%). Belanja modal

sebesar Rp.20.170.905.976,00 Dengan realisasi Rp.15.803.339.340,00 (78,35%).

Adapun capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 27.010.000,- realisasi Rp. 18.012.778,- (66,69%).
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp.202.629.020,- realisasi Rp.186.822.876,- (92,20%).
- 3) Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 53.445.000,- realisasi Rp. 38.390.000,- (71,83%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.66.483.016.898,- realisasi Rp.65.891.619.128,- (99,11%).
- 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp.579.081.500,- realisasi Rp. 539.343.000,- (93,14%).
- 3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.3.094.600,- realisasi Rp. 2.970.100,- (95,98%).
- 4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.3.094.600,- realisasi Rp.2.328.400,- (75,24%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- realisasi Rp. 10.500.000,- (100%).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah..

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp.18.825.000,- realisasi Rp. 18.759.940,- (99,65%).

2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp.221.384.100,- realisasi Rp. 215.343.757,- (97,27%).

3) Penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp.27.980.000,- realisasi Rp.26.298.900,- (93,99%).

4) Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp.92.475.000,- realisasi Rp.90.777.500,- (98,16%).

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 58.154.900,- realisasi Rp. 43.925.100,- (75,53%).

6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- realisasi Rp. 1.890.000,- (63,00%).

7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 158.932.000,- realisasi Rp. 78.350.558,- (49,30%).

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp.46.805.000,- realisasi Rp. 46.752.500,- (99,89%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000,- realisasi Rp.7.000.000,- (100%).

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 360.900.000,- realisasi Rp. 313.421.208,- (86,84%).

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. dengan anggaran sebesar Rp.102.555.000,- realisasi Rp.96.494.994,- (94,09%).

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp.20.970.000,- realisasi Rp.20.964.500,- (99,97%).

2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp.418.053.860,- realisasi Rp.405.737.590,- (97,05%).

3) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.524.440.940,- realisasi Rp.495.437.542,- (94,47%).

4) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

dengan anggaran sebesar Rp. 57.980.000,- realisasi Rp. 57.980.000,- (100,00%).

h. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan anggaran sebesar Rp.48.529.001.651,- realisasi Rp.39.220.217.229,- (80,82%).

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1) Pembangunan puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.1.156.380.000,- realisasi Rp.912.150.247,- (78,88%).

2) Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.1.207.980.000,- realisasi Rp.851.424.287,- (70,48%).

3) Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.3.500.655.900,- realisasi Rp. 3.234.667.289,- (92,40%).

4) Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.3.133.815.000,- realisasi Rp.3.046.111.393,- (97,20%).

5) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.3.696.004.300,- realisasi Rp.3.135.625.258,- (84,84%).

6) Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi dengan

anggaran sebesar Rp.130.000.000,- realisasi Rp.82.721.000,- (63,63%).

7) Pengadaan obat, vaksin dengan anggaran sebesar Rp.6.178.273.384,- realisasi Rp.6.103.908.703,- (98,80%).

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini terdiri dari 30 (tiga puluh) sub kegiatan, yaitu :

1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, dengan anggaran sebesar Rp.1.367.410.000,- realisasi Rp. 1.133.740.000,- (82,91%).

2) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin, dengan anggaran sebesar Rp.1.835.708.000,- realisasi Rp. 1.621.099.286,- (88,31%).

3) Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dengan anggaran sebesar Rp. 39.050.000,- realisasi Rp. 16.700.000,- (42,77%).

4) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita, dengan anggaran sebesar Rp.461.315.200,- realisasi Rp.375.400.200,- (81,38%).

5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, dengan anggaran sebesar Rp.402.137.800,- realisasi Rp.229.269.100,- (57,01%).

6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, dengan anggaran sebesar Rp.709.541.000,- realisasi Rp.545.517.856,- (76,88%).

7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, dengan anggaran sebesar Rp. 192.675.000,- realisasi Rp. 134.015.000,- (69,55%).

- 8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dengan anggaran sebesar Rp.71.200.000,- realisasi Rp. 58.825.000,- (82,62%).
- 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, dengan anggaran sebesar Rp.49.212.500,- realisasi Rp. 35.750.000,- (72,64%).
- 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dengan anggaran sebesar Rp.78.250.000,- realisasi Rp. 54.970.000,- (70,25%).
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, dengan anggaran sebesar Rp.229.082.820,- realisasi Rp.147.367.432,- (64,33%).
- 12) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV, dengan anggaran sebesar Rp.74.330.004,- realisasi Rp. 45.347.746,- (61,01%).
- 13) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan anggaran sebesar Rp. 27.975.624.869,- realisasi Rp.16.126.667.659,- (57,65%).
- 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.1.545.545.400,- realisasi Rp. 1.191.896.708,- (77,12%).
- 15) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga, dengan anggaran sebesar Rp.162.031.500,- realisasi Rp. 68.883.000,- (42,51%).
- 16) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp.1.807.651.650,- realisasi Rp. 1.158.435.112,- (64,09%).
- 17) Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.1.740.170.040,- realisasi Rp.1.457.425.454,- (83,75%).

- 18) Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 26.112.850,- realisasi Rp.13.597.850,- (52,07%).
- 19) Pengelolaan surveilans Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.275.133.955,- realisasi Rp.132.697.000,- (48,23%).
- 20) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), dengan anggaran sebesar Rp.5.899.971,- realisasi Rp.4.109.300,- (69,65%).
- 21) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA. dengan anggaran sebesar Rp. 61.050.000,- realisasi Rp. 54.670.000,- (89,55%).
- 22) Pengelolaan upaya kesehatan khusus. dengan anggaran sebesar Rp.1.285.035.840,- realisasi Rp.990.440.412,- (77,07%).
- 23) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. dengan anggaran sebesar Rp.678.505.001,- realisasi Rp.322.355.335,- (47,51%).
- 24) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.20.480.122.116,- realisasi Rp.19.223.134.592,- (93,86%).
- 25) Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional. dengan anggaran sebesar Rp. 12.700.000,- realisasi Rp. 5.977.000,- (47,06%).
- 26) Operasional pelayanan puskesmas, dengan anggaran sebesar Rp.604.879.300,- realisasi Rp.566.186.363,- (93,60%).
- 27) Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya

dengan anggaran sebesar Rp.145.112.600,-
realisasi Rp.139.386.177,- (96,05%).

- 28) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.1.271.452.000,- realisasi Rp.0,- (0,00%).
 - 29) Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) dengan anggaran sebesar Rp.5.638.171.900,- realisasi Rp.5.019.861.003,- (89,03%).
 - 30) Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, dengan anggaran sebesar Rp.110.575.000,- realisasi Rp. 104.600.000,- (94,60%).
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi,
- Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
- 1) Pengelolaan data dan informasi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 97.272.756,- realisasi Rp.65.958.000,- (67,81%).
 - 2) Pengelolaan sistem informasi Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.166.737.823,- realisasi Rp.106.908.525,- (64,12%).
 - 3) Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet, dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.322.000,- (95,48%).
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
- 1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dengan

anggaran sebesar Rp.3.188.100,- realisasi Rp.1.240.000,- (38,89%).

2) Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. dengan anggaran sebesar Rp. 6.950.000,- realisasi Rp. 3.760.000,- (54,10%).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Wilayah kabupaten/kota.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan. dengan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- realisasi Rp.3.000.000,- (100,00%).

b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumberdaya manusia kesehatan dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi Rp.4.300.000,- (86,00%).

2) Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp.7.050.000,- realisasi Rp. 4.775.000,- (67,73%).

3) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, dengan anggaran sebesar Rp.915.856.000,- realisasi Rp.893.965.233,- (97,61%).

c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan, anggaran sebesar Rp.241.240.000,- realisasi Rp.137.822.900,- (57,13%).

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman.

Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

a. Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1) Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan anggaran sebesar Rp.37.171.500,- realisasi Rp. 5.350.950,- (14,40%).

2) Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT), dengan anggaran sebesar Rp.24.749.000,- realisasi Rp. 6.650.000,- (26,87%).

3) Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan anggaran sebesar Rp.0,- realisasi Rp.0,- (0,00%).

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri Rumah Tangga.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah

tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga. dengan anggaran sebesar Rp.105.173.400,- realisasi Rp.71.224.500,- (67,72%).

- c. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh industri Rumah Tangga.

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan anggaran sebesar Rp.17.818.000,- realisasi Rp.0,- (0,00%).

- d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan dengan anggaran sebesar Rp.9.850.000,- realisasi Rp.0,- (0,00%).

- e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan,

dengan anggaran sebesar Rp. 81.597.000,- realisasi Rp. 55.720.000,- (68,29%).

- 2) Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga, dengan anggaran sebesar Rp.0,- realisasi Rp.0,- (0,00%).

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dengan anggaran sebesar Rp.279.506.200,- realisasi Rp. 236.980.000,- (84,79%).

- b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), dengan anggaran sebesar Rp.167.253.300,- realisasi Rp.94.382.300,- (56,43%).

❖ **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2022**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2022 penetapan, Program, kegiatan dan sub kegiatan sudah mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, untuk pendapatan sebesar Rp.40.167.010.000, belanja sebesar Rp.162.512.444.347,- terurai dalam 5 program, 22 kegiatan dan 82 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan

maupun realisasi fisik/hasil capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Sedangkan untuk capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021
Berdasarkan Hasil Pemetaan Program Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Kode	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021		Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)) 2022	Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
						Target Renja PD Tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2021		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	dokumen	5	3	1	1	1	5	100
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja	dokumen	5	3	1	1	1	5	100

1.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	dokumen	5	3	1	1	1	5	100
1.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LKJIP	dokumen	5	3	1	1	1	5	100
			Tersusunnya LKPJ	dokumen	5	3	1	1	1	5	100
			Tersusunnya LPPD	dokumen	5	3	1	1	1	5	100
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat daerah	bulan	60	36	12	12	12	60	100	
1.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS, CPNS dan TTP	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	dokumen	5	3	1	1	1	5	100
1.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	dokumen	5	3	1	1	1	5	100
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		bulan	60	36	12	12	12	60	100	
1.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai	orang	40	15	10	4	9	20	50

1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	5	3	1	1	1	5	100
1.02.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	bulan	60	36	12	12	12	60	100
			Tersedianya makan dan minuman	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah	bulan	60	36	12	12	12	60	100

1.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	pkt	5	3	1	1	1	5	100
1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bulan	60	36	12	12	12	60	100

1.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	bulan	60	36	12	12	12	60	100
			Terehabilitasinya kendaraan dinas/operasional	unit	10	6	2	1	2	9	90
1.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	pkt	5	3	1	1	1	5	100
			Meningkatnya keamanan kantor	bulan	60	36	12	12	12	60	100
1.02.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	60	36	12	12	12	60	100
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Puskesmas dengan PPK BLUD	%	100	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD di Puskesmas	pusk	21	21	21	21	21	21	100
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas	%	75	77,13	72	63,95	75	75	100
			Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas	%	2	0,65	1,38	1,17	2	1,5	75
			Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100	95	100	94,96	100	25	25

			Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang	%	100	95	100	100	100	25	25
			Ketersediaan jenis obat esensial	%	100	64,79	100	80	100	85	85
			Ketersediaan jumlah obat esensial	%	100	75	100	100	100	65	65
			Ketersediaan jenis obat generik	%	100	62,34	100	74	100	70	70
			Keersediaan jumlah obat generik	%	100	80	100	78	100	65	65
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	86,28	109,36	94,13	273,43	86,28	130	49,33
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	12	9,45	12,3	10,11	12	9,3	122,50
			Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 KH	15,1	11,56	15,3	10,94	15,1	10,5	130,46
			Persentase Berat Badan Lahir Rendah	%	5	4,76	5,2	5,24	5	5	100
			Persentase Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis	%	8	12,28	8,3	10,77	8	9	87,5

			(KEK)								
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	100	96,43	99	93,64	100	100	100
			Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	99,49	100	99,60	100	100	100
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	99,39	100	99,30	100	100	100
			Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	72,58	97	80,01	100	95	95
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	31,92	100	47,79	100	90	90
			Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	58,94	90	62,04	100	80	80

			Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	41,04	96	34,76	100	50	50
			Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	93,26	96	94,70	100	100	100
			Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	96,03	100	82,11	100	100	100
			Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,70	74,69	74,66	74,74	74,70	74,9	100,27
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	41,41	100	64,09	100	80	80
			Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +	%	89,5	85,88	89,3	84,2	89,5	88	98,32
			Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB	per 100.000	109	110,24	108	100,64	109	109	100

				penduduk							
			Persentase orang terduga Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	45,32	95	38,88	100	55	55
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100	78,68	95	103,58	100	100	100
			Angka Penemuan Kasus Kusta Baru	per 100.000 penduduk	8	4	7	3,74	8	5	62,5
			Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue	per 100.000 penduduk	42	34,34	43	3,23	42	25	140,48
			Angka Kesakitan Malaria	per 1.000 penduduk	0,01	0,001	0,01	0	0,01	0,004	160
			Prevalensi Gizi buruk	%	0,16	0,17	0,17	0,21	0,16	0,19	81,25
			Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan	%	100	100	100	100	100	100	100,00
			Cakupan pemberian ASI eksklusif	%	50	62,33	46	63,08	50	65	130
			Persentase Rumah yang memenuhi syarat	%	70	57,03	67	57,90	70	60	85,71

			kesehatan								
			Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan	%	82	70,75	80	72,69	82	80	97,56
			Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi puskesmas per jumlah penduduk	per 30.000 penduduk	1	0,81	1	0,79	1	0,79	79
1.02.02.2.01.02		Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya/penambahan ruang puskesmas	unit	16	4	2	1	0	5	31,25
			Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	unit	1	1	0	0	0	1	100
1.02.02.2.01.09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terpeliharanya gedung puskesmas	unit	1	2	0	1	0	3	300
			Terpeliharanya gedung puskesmas pembantu	unit	29	8	10	0	0	8	27,59
1.02.02.2.01.12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya ambulan/puskesmas keliling/mobil jenazah	unit	12	4	3	3	1	8	66,67
			Jumlah mobil promosi kesehatan	unit	1	1	0	0	0	1	100

			Jumlah pengadaan kendaraan operasional kesehatan roda 2	unit	64	21	1	3	1	25	39,06
			Tersedianya mobil Vaksin	unit	1	0	1	1	0	1	100
			Pembangunan Gedung PSC 119	unit	1	1	0	0	0	1	100
			Perangkat sistem informasi dan komunikasi untuk PSC/SPGDT	paket	1	2	0	0	0	2	200
1.02.02.2.01.13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya IPAL sesuai standar di puskesmas	paket	21	3	6	6	0	9	42,86
1.02.02.2.01.14		Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan untuk puskesmas	paket	5	3	1	1	1	5	100
1.02.02.2.01.15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terkalibeasinya alat kesehatan di puskesmas	paket	2	0	1	1	1	2	100
1.02.02.2.01.16		Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar	paket	5	3	1	1	1	5	100
1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah /Kota	Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100

			Cakupan kunjungan ibu nifas	%	99,95	99,91	99,93	99,81	99,95	99,95	100
1.02.02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan KN lengkap	%	99,35	99,39	99,3	99,30	99,35	99,35	100
			Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang diberi pelayanan sesuai standar	balita	47.493	33.511	43.782	35.030	47.493	38.200	80,43
1.02.02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat pelayanan kesehatan (Penjaringan)	%	100	63,90	100	88,23	100	100	100
1.02.02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pake (Posbindu kit)	kit	210	72	42	74	42	188	89,52
			Jumlah warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	500.000	293.242	530.790	329.284	500.000	334.054	66,81
1.02.02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tersedianya lansia kit	kit	95	27	25	22	25	71	74,74

			Pelatihan kader posyandu lansia	orang	1.290	80	200	0	200	80	6,20
1.02.02.2.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	208.115	85.405	221.118	76.861	208.115	76,454	36,74
1.02.02.2.02.09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	15.000	9.401	9.973	9.444	15.000	10.234	68,23
1.02.02.2.02.10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	1.813	1.741	2.046	1.680	1.813	1.644	90,68
1.02.02.2.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif	%	91	88,57	90,9	87,24	91	89	97,80
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapat pelayanan TB sesuai standar	orang	8.850	4.040	8.914	3.466	8.850	4.000	45,20
1.02.02.2.02.12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	orang	16.727	13.079	14.994	15.531	16.727	14.494	86,65
1.02.02.2.02.13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah penderita covid yang ditemukan	orang	2.103	2.257	2.075	5.708	28	9.197	437,33

1.02.02.2.02.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi kurus yang mendapat PMT	%	85	100	100	100	85	85	100
			Remaja putri yang mendapatkan TTD	%	50	43,81	45	32,50	50	50	100
			Balita datang ditimbang (D/S)	%	85	54,77	84,5	75,65	85	85	100
			Persentase balita BGM	%	0,95	0,69	0,97	0,87	0,95	0,80	115,79
1.02.02.2.02.16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pos UKK (formal) yang dibina	%	25	15,30	20	15	25	20	80
1.02.02.2.02.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya dokumen kondisi kesehatan lingkungan di Kab. Batang	dok	2	1	0	0	0	1	50
			Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	100	91,48	99	91,64	100	95	95
			Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (Jamban Sehat)	%	100	85,51	95	83,20	100	87,5	87,5
			Cakupan desa yang melaksanakan STBM	%	100	99,19	100	100	100	100	100
			persentase TTU yang dibina	%	100	90	95	96,13	100	98	98
1.02.02.2.02.18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pembuatan balliho	Buah	28	19	5	3	5	22	78,57

			Pembuatan film promkes	Film	11	3	2	1	2	4	36,36	
			Pembuatan spot radio	Spot	24	16	4	5	4	21	87,5	
1.02.02.2.02.19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	orang	45	0	20	20	25	35	77,78
				Terbentuknya asuhan mandiri taman obat keluarga	buah	5	0	3	0	2	2	40
1.02.02.2.02.20			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<i>Acute Flacid Paralysis (AFP) rate</i>	per 100.000 penduduk < 15 th	2	1,10	2	2,76	2	2	100
1.02.02.2.02.21			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	3.571	1.741	845	1.381	845	3.967	111,09
1.02.02.2.02.22			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan ketergantungan NAPZA yang mendapat pelayanan kesehatan	orang	320	50	75	1	95	60	18,75
1.02.02.2.02.23			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya kegiatan PSC 119	bl	60	36	12	12	12	60	100
				Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kesehatan gigi	%	65	31,39	63	56,47	65	59	90,77
				Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi	%	85	50,66	80	51,11	85	60	70,59
				Tersedianya posko	pos	6	5	6	5	6	6	100

			kesehatan pada saat lebaran								
1.02.02.2.02.25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
			Anga kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue	%	1	1,50	1	4	1	1	100
1.02.02.2.02.26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN	jiwa	40.000	31.556	35.000	86.520	40.000	32.000	80
1.02.02.2.02.28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB yang dikirim ke laboratorium	spcmn	38	0	19	7	19	20	52,63
1.02.02.2.02.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas mendapatkan BOK	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.02.34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 21 puskesmas	%	100	96	100	100	100	100	100
1.02.02.2.02.35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas direakreditasi	Pusk	21	9	21	0	10	9	42,86
1.02.02.2.02.36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	99	92,57	98,80	85,97	99	94	94,95
			Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	88,31	100	100	100

1.02.02.2.02.37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya kegiatan epideiologi	kali	1.260	2.193	252	251	252	2.696	213,97
1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.03.1		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tesusnya profil kesehatan Kab Batang	dok	5	3	1	1	1	5	100
1.02.02.2.03.2		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya e logistik di IFK	bl	60	36	12	12	12	60	100
1.02.02.2.03.3		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terkoneksinya SIK dengan jaringan internet	%	100	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase sarana kesehatan yang berijin	%	100	97,73	100	97,96	100	100	100
1.02.02.2.04.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terlaksananya visitasi dan monev Perijinan RS	kl	15	9	3	0	3	12	80
1.02.02.2.04.03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelaksanaan kegiatan visitasi dan monev perijinan klinik	kl	80	23	15	13	15	45	56,25
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	97	92,40	95	98,97	97	99	102,06

	MANUSIA KESEHATAN										
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota		Jumlah tenaga kesehatan yang mengajukan ijin (baru/perpanjangan)	orang	779	0	380	535	399	779	100
1.02.03.2.01.01		Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang tidak memperpanjang surat ijin tenaga kesehatan (Kadaluwarsa)	orang	135	166	224	12	135	7	194,81
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota		Tersusunnya kebutuhan SDM	kl	2	0	1	1	1	2	100
1.02.03.2.02.01		Perencanaan dan distribusi serta Pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Tersusunnya kebutuhan SDM di tiap puskesmas	kl	2	0	1	1	1	2	100
1.02.03.2.02.03		Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Terlaksananya bimtek SDM	kl	2	0	3	3	1	4	200
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota		Meningkatnya kompetensi SDM	orang	165	0	80	36	85	165	100
1.02.03.2.03.01		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat	orang	50	0	10	36	10	46	92
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	61	72,20	60	71,73	61	75	122,95

			Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan	%	80	65,05	78	67,68	80	71,3	93,82
1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Surat izin	47	0	32	40	15	63	134,04
1.02.04.2.01.01		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina	%	100	94,79	100	26,39	100	100	100
1.02.04.2.01.02		Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian	kl	233	0	115	26	118	144	61,80
1.02.04.2.01.03		Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Bintek pengelola obat puskesmas	kl	8	0	4	0	4	3	37,5
1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin	Jumlah sertifikat yang terbit untuk PIRT	sertifikat	234	0	114	70	120	70	29,91

		Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
1.02.04.2.03.01		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) berijin yang dibina	%	56	0	54	38	56	56	100
1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sertifikat laik higiene sanitasi TPM yang diterbitkan	sertifikat	150	0	60	0	90	30	20
1.02.04.2.04.01		Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang dibina	%	100	90	93	67,1	100	90	90
1.02.04.2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan yang diterbitkan	stiker	152	0	70	0	82	50	32,89
1.02.04.2.05.01		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	Jumlah pengelola makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang dibina	pengelola	90	0	30	0	60	60	66,67

		Makanan Jajanan										
1.02.04.2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	%	100	0	100	100	100	100	100	
1.02.04.2.06.01		Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pemeriksaan laboratorium terakreditasi sampling dan pengujian PIRT	sampel	34	0	16	16	18	34	100	
1.02.04.2.06.02		Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Tersedianya data perijinan PIRT	dok	2	0	1	1	1	2	100	
1.02.05		PROGRAM MASYARAKAT KESEHATAN	PEMBERDAYAAN BIDANG	Cakupan Desa Sisga Aktif Strata Mandiri	%	16,1	6,85	15,7	8,06	16,1	16,53	102,67
1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS tatanan Rumah Tangga	%	88	92,53	87,7	94,28	88	95	107,95	
1.02.05.2.02.01		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Terlaksananya Germas On CFD	kali	20	8	4	2	4	13	65	
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Strata Mandiri	%	44	48,86	43,5	51,63	44	52	118,18	

1.02.05.2.03.01		Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu yang dilakukan pembinaan	pos	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	100
-----------------	--	--	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang, memberikan gambaran kondisi kualitas hidup dan status kesehatan masyarakat, dimana Angka Harapan Hidup selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari 74,56 pada tahun 2018, 74,59 pada tahun 2019, 74,69 pada tahun 2020 dan 74,74 pada tahun 2021. Sedangkan kondisi status kesehatan masyarakat, sebagaimana indikator sasaran menurunkan angka kematian dan kesakitan serta meningkatkan status gizi masyarakat, adalah :

1. Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari 109,36 per 100.000 kelahiran hidup (14 kasus) pada tahun 2020 menjadi 273,43 per 100.000 kelahiran hidup (33 kasus) pada tahun 2021, angka ini masih diatas target tahun 2021 sebesar 94,13 per 100.000 kelahiran hidup dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 86,28 per 100.000 kelahiran hidup maupun angka Jawa Tengah sebesar 199,0 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan :
 - a. Kematian ibu maternal disebabkan adanya penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB, hipertensi, covid-19 dll.
 - b. Masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) sebesar 10,77% yang disebabkan masih adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu diwaktu hamil (nyirik).

- c. Masih tingginya angka komplikasi kebidanan pada tahun 2021 sebesar 32,26%.
- d. Masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur (yang memeriksakan K1 tetapi tidak dilanjutkan sampai K4) sebanyak 6,36%, sehingga jika ada kelainan dalam kehamilannya tidak segera diketahui.

Upaya yang dilakukan :

- a. Mempersiapkan kesehatan calon ibu sedini mungkin, mulai pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan KUA untuk memberikan bimbingan pada calon pengantin.
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin.
- d. Melakukan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan), dengan tenggang waktu, satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester ke dua dan dua kali pada trimester ketiga.
- e. Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan.
- f. Melakukan bimbingan pada ibu hamil dan suami tentang perawatan kehamilan, melahirkan dan nifas dengan membentuk kelas ibu hamil dan kelas bapak.
- g. Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (tidak di rumah atau Poliklinik Kesehatan Desa).
- h. Semua puskesmas (perawatan dan non perawatan) menyediakan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan.
- i. Meningkatkan sistem rujukan untuk ibu hamil resiko tinggi dan komplikasi kebidanan ke rumah sakit.
- j. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan khususnya bidan.

- k. Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK).
 - l. Melakukan pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar.
 - m. Melakukan audit maternal pada kasus kematian ibu untuk melakukan penelusuran kasus kematian ibu dan mencari tindak lanjut pelayanan kesehatan ibu yang lebih baik dan tidak terulang dikemudian hari.
 - n. Melakukan kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan melibatkan suami, keluarga dan masyarakat.
 - o. Melakukan kegiatan Batang Jateng Nginceng Wong Meteng (5 ng).
 - p. Melibatkan dan bekerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5 ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya.
 - q. Meningkatkan penyuluhan ibu hamil untuk penerapan protokol kesehatan dan PHBS.
2. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan peningkatan dari 9,45 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 10,11 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 sebesar 12,3 per 1.000 kelahiran hidup maupun target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup.
- Meskipun sudah mencapai target akhir periode renstra namun tahun 2021 menunjukkan peningkatan dan masih di atas angka Jawa Tengah sebesar 7,9 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga perlu mendapatkan perhatian untuk melakukan upaya-upaya penurunan AKB, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan menjaga kesehatan ibu hamil dan memberikan PMT pada ibu hamil KEK.
 - b. Memberikan ASI setelah bayi lahir sampai bayi usia 6 bulan (ASI eksklusif) dan tidak memberikan makanan lain kecuali obat.
 - c. Melakukan pemeriksaan neonatus dan bayi sesuai standar.
 - d. Memberikan imunisasi dasar lengkap.
 - e. Melakukan audit perinatal pada kasus kematian bayi untuk menelusuri penyebab kematian sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
 - f. Mengembangkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).
 - g. Inisiasi Menyusui Dini selama satu jam.
 - h. Pemberian vit A pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun.
 - i. Mengadakan pelatihan konselor ASI bagi tenaga kesehatan.
 - j. Melakukan pertemuan gerakan ASI Eksklusif bagi kader kesehatan
 - k. Melaksanakan pelatihan tatalaksana neonatus di semua puskesmas dengan peserta (Dokter, Bidan, Perawat) untuk menurunkan angka kematian akibat asfeksia.
 - l. Melaksanakan pertemuan lintas program dan lintas sektor dalam deteksi dini (tanda bahaya bayi).
 - m. Melakukan pelatihan Pemberian Makanan Bayi Balita (PMBA) untuk petugas gizi dan Bidan.
3. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan penurunan dari 11,56 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 10,94 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 sebesar 15,30 per 1.000 kelahiran hidup maupun target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 15,1 per 1.000 kelahiran hidup.

Meskipun sudah mencapai target akhir periode Renstra namun masih di bawah angka Jawa Tengah sebesar 8,9 per 1.000 kelahiran hidup sehingga perlu dilakukan upaya penurunan AKABA, yaitu :

- a. Melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu.
 - b. Melakukan pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Managemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
 - c. Memberikan imunisasi lanjutan.
 - d. Memberikan vitamin A setahun dua kali.
 - e. Meningkatkan pengetahuan ibu tentang perawatan balita dengan membentuk kelas ibu balita.
 - f. Melakukan rujukan kasus balita gizi buruk dengan komplikasi penyakit ke rumah sakit.
 - g. Melakukan audit perinatal pada kasus kematian bayi untuk melakukan penelusuran penyebab kematian sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
 - h. Melakukan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali setahun.
4. Case Notification Rate (CNR) kasus Tuberculosis menunjukkan penurunan, dari 110,24 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 87,88 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Angka ini masih di bawah target tahun 2021 sebesar 108 per 100.000 penduduk dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 109 per 100.000 penduduk.
- Turunnya CNR disebabkan karena pandemic covid-19, dimana kegiatan penemuan penderita tuberculosa tidak dapat optimal, karena sumberdaya difokuskan pada penanganan covid-19
5. Angka kesembuhan pengobatan TB BTA positif (*CR/Cure Rate*) menunjukkan penurunan, dari 88,88% pada tahun 2020 menjadi 85,54% tahun 2021, Angka ini masih di bawah target tahun 2021

sebesar 89,3% dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 89,5%. Hal ini disebabkan :

- a. Dengan adanya pandemi covid-19, menyebabkan penderita Tuberkolosa yang sedang dalam pengobatan takut ke puskesmas (tertular covid).
- b. Kurangnya kesadaran penderita tuberculosa dalam mematuhi ketentuan dalam proses pengobatan (apabila sudah merasa enak badannya/nyaman, tidak melanjutkan minum obat/berhenti minum obat).

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja CR penderita TB BTA positif, yaitu :

- a. Memberikan penyuluhan pada penderita dan keluarga tentang penyakit TB dan proses pengobatannya.
 - b. Menunjuk anggota keluarga untuk menjadi Pengawas/Pendamping Menelan Obat (PMO).
 - c. Melakukan deteksi dini pada penduduk yang mempunyai gejala penyakit TB sehingga penderita diketahui secara dini dengan kondisi belum parah.
6. Angka kesalitan Demam Berdarah Dengue (*Incidence Rate/IR*) menunjukkan penurunan, dari 34,34 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 3,23 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 sebesar 43 per 100.000 penduduk dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 42 per 100.000 penduduk.

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan IR DBD, yaitu :

- a. Melakukan penyuluhan pada masyarakat tentang penyakit DBD dengan berbagai media.
- b. Membentuk jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan DBD.
- c. Melakukan penyelidikan epidemiologi apabila ada kasus DBD.

- d. Menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan PSN secara rutin di daerah endemis DBD.
 - e. Melakukan fogging focus pada lokasi KLB DBD.
 - f. Melakukan pemantauan jentik berkala oleh kader jumentik.
7. Angka penemuan kasus baru kusta menunjukkan penurunan, dari 4 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 3,74 per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Angka ini masih di bawah target tahun 2021 sebesar 7 per 100.000 penduduk dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 8 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan :
- a. Terbatasnya tenaga pengelola program P2 Kusta, baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.
 - b. Kurang optimalnya pencarian penderita baru di sekitar lingkungan penderita kusta (kontak tracing).
 - c. Kegiatan pencarian penderita baru kusta tidak dapat optimal karena pandemi covid-19.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja penemuan kasus baru kusta, yaitu :

- a. Melakukan pencarian penderita pada keluarga dekat dengan penderita dan masyarakat dalam satu lingkungan dengan melibatkan kader kesehatan.
 - b. Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan program kusta, sehingga semua kegiatan tercatat dan dilaporkan.
 - c. Memberikan pelayanan pengobatan bagi penderita kusta sesuai standart.
8. Angka kesakitan malaria menunjukkan penurunan, dari 0,001 pada tahun 2020 menjadi 0,000 tahun 2021. Angka ini sudah di bawah target tahun 2021 maupun target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 0,01 per 1.000 penduduk.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja *Annual Parasite Incidence (API)*, yaitu :

- a. Melakukan Penyelidikan epidemiologi di lingkungan penderita, untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus malaria, mengingat Kabupaten Batang bukan daerah endemis malaria.
 - b. Melakukan pengambilan darah penderita terduga penyakit malaria untuk diperiksa positif/negatif malaria.
 - c. Melakukan pengobatan penderita.
 - d. Menindak lanjuti temuan kasus malaria dari KKP pada orang-orang yang datang dari luar Jawa dengan pelacakan ke alamat penderita.
9. Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan peningkatan, dari 0,17% pada tahun 2020 menjadi 0,21% pada tahun 2021, angka ini masih di atas target tahun 2021 sebesar 0,17% dan target akhir periode renstra tahun 2022 sebesar 0,16%.

Hal ini dikarenakan dengan kondisi pandemi covid-19 kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga apabila terjadi balita gizi kurang tidak segera diketahui dan terlambat mendapatkan intervensi.

Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja prevalensi balita gizi buruk, yaitu :

- a. Meningkatkan penyuluhan pada ibu-ibu untuk menimbang balitanya ke posyandu se bulan sekali, untuk mengetahui tumbuh kembang balita.
- b. Memberikan PMT penyuluhan untuk balita yang ditimbang di posyandu.
- c. Memberikan intervensi pada balita kurus dengan pemberian PMT pemulihan.
- d. Memberikan perawatan pada ballita gizi buruk yang ditemukan.
- e. Melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui penimbangan tiap bulan di posyandu.

- f. Melaksanakan pelatihan kader dalam pemantauan dan penanganan tumbuh kembang anak.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub sebagaimana dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022 Semester 1	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	-	-	-	-	74,84	74,89	74,74	74,74	74,84	74,89	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	-	-	-	-	160	136	273,43	140,45	160	136	
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 kelahiran hidup	-	-	-	-	8,48	8,08	10,11	8,95	8,48	8,08	
4	Prevalensi balita stunting	%	-	-	-	-	13,87	13,72	14,14	13,26	13,87	13,72	
5	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	%	-	-	-	-	87	89	86,15	86,45	87	89	
6	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar	%	-	-	-	-	71,42	80,95	52,38	66,67	71,42	80,95	
7	Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar	%	-	-	-	-	65	70	TAD	11,86	65	70	
8	Persentase desa siaga aktif strata Mandiri	%	-	-	-	-	10,48	11,69	8,06	8,06	10,48	11,69	
9	Nilai kepuasan masyarakat	Indeks	-	-	-	-	88,5	88,75	TAD	TAD	88,75	88,75	

10	Nilai sakip Dinas Kesehatan	%	-	-	-	-	79	80	76,91	77,66	79	80
11	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	%			-	-	100	100	75,04	37,47	100	100
12	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (<i>Incidence Rate/IR</i>)	Per 100.000 Penduduk			-	-	22	21	3,23	13,46	22	21
13	CNR semua kasus Tuberculosis/TB (<i>Case Notification Rate/CNR</i>)	Per 100.000 Penduduk			-	-	110	115	100,64	59,75	110	115
14	Angka penemuan kasus baru kusta (<i>New Case Detection Rate/NCDR</i>)	Per 100.000 Penduduk			-	-	4	4,1	3,74	1,48	4	4,1
15	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%			-	-	99,01	99,34	98,97	98,98	99,01	99,34
16	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%			-	-	100	100	100	100,00	100	100
17	Rasio posyandu mandiri terhadap balita	per 1000 balita			-	-	11,74	12,24	10,74	10,74-	11,74	12,24
18	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	%			-	-	96	97	TAD	TAD	96	97
19	Jumlah puskesmas terakreditasi	puskesmas			-	-	21	21	21	21	21	21
20	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	puskesmas			-	-	21	21	21	21	21	21
21	Jumlah desa ODF	desa			-	-	118	139	76	76	118	139
22	Jumlah kasus kematian ibu	kasus			-	-	20	17	33	8	20	17
23	Jumlah kasus kematian bayi	kasus			-	-	106	101	122	51	106	101

24	Jumlah kasus kematian balita	kasus			-	-	118	108	132	56	118	108	
25	Jumlah balita stunting	balita			-	-	5.600	5.500	5.275	5.182	5.600	5.500	
26	Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	orang			-	-	175	170	25	109	175	170	
27	Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	orang			-	-	920	960	816	484	920	960	
28	Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	orang			-	-	31	33	29	14	31	33	
29	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	dok			-	-	1	1	1	0	1	1	
30	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi			-	-	2	2	2	2	2	2	
31	Jumlah fasyankes yang berijin	Fasyankes			-	-	51	54	48	46	51	54	
32	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	orang			-	-	610	680	535	499	610	680	
33	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	orang			-	-	100	130	36	12	100	130	
34	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen			-	-	1	1	1	0	1	1	
35	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	nakes			-	-	40	40	36	10	40	40	
36	Jumlah Apotek yang berijin	Apotik			-	-	72	73	70	76	79	82	
37	Jumlah Toko Obat yang berijin	Toko obat			-	-	4	4	6	6	6	6	
38	Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Toko alkes/optikas			-	-	13	13	13	16	17	18	

40	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat	sertifikat		-	-	220	220	215	261	266	270	
41	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	TPM		-	-	420	440	425	453	525	575	
42	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	%		-	-	28	30	100	-	100	100	
43	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	desa		-	-	30	32	20	20	41	50	
44	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	dokumen		-	-	2	2	2	0	2	2	
45	Jumlah posyandu strata mandiri	posyandu		-	-	600	650	635	635	640	650	
46	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	orang	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	-	-	13.100	13.200	11.949	5.692	13.100	13.200	
47	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	orang	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	-	-	12.900	13.000	12.048	5.698	12.900	13.000	
48	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	orang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	12.800	12.900	11.984	5.659	12.800	12.900	
49	Jumlah anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	orang	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai	-	-	34.711	35.111	35.030	20.723	34.711	35.111	

			standar										
50	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		-	-	112.550	112.600	50.406	18.152	112.550	112.600	
51	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	orang	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		-	-	555.121	580.354	329.284	167.027	555.121	580.354	
52	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				75.000	80.000	63.212	37.403	75.000	80.000	
53	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		-	-	212.409	212.515	76.861	38.227	212.409	212.515	,
54	Jumlah penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-	-	10.379	10.430	9.444	5.117	10.379	10.430	

55	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	orang	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		-	-	1.839	1.853	1.680	822	1.839	1.853	
56	Jumlah orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	orang	Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		-	-	4.100	4.200	3.466	2.000	4.100	4.200	
57	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	orang	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar		-	-	15.169	15.257	15.531	7.247	15.169	15.257	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang kesehatan, maka masih banyak berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi yaitu diantaranya:

1. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita di Kabupaten Batang, dimana dari tahun ke tahun meskipun menunjukkan penurunan namun angka tersebut masih fluktuatif tiap tahunnya dan masih di bawah angka Jawa Tengah.
2. Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dengan mobilitas penduduk yang tinggi antar wilayah, mempercepat sebaran penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan karena penyakit menular masih cukup tinggi, misalnya HIV/AIDS dan DBD, Tuberculosis.
3. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak pada rendahnya kualitas lingkungan seperti pembuangan sampah tidak pada tempatnya berdampak pada masalah kesehatan.
4. Cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masih di bawah target, hal ini karena masih ada beberapa indikator yang sulit di capai, yaitu kebiasaan merokok, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
5. Kondisi geografis beberapa wilayah (pegunungan) menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
6. Masih adanya budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat program kesehatan. Misalnya pertolongan persalinan tidak di fasyankes, sebagian masyarakat belum menerima program imunisasi, tidak mau menyusui, pantang makanan tertentu baik pada masa kehamilan maupun saat menyusui dll.

7. Kesadaran sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan masih rendah, hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan kesehatan.
8. Terbatasnya tenaga kesehatan terutama tenaga dokter spesialis kebidanan, hal ini mengakibatkan terlambatnya penanganan pada kasus-kasus kebidanan.
9. Terbatasnya tenaga kesehatan di puskesmas, menjadi beban ganda dalam masa pandemi covid 19. (jumlah tenaga terbatas sementara harus melayani penderita covid dengan resiko tertular sehingga harus menjalani isolasi, dengan demikian tenaga kesehatan yang bertugas semakin berkurang).
10. Sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi, ketepatan, akurasi, kecepatan dan kelengkapan.

Selain beberapa kendala dan hambatan yang ada, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus dihadapi pada masa mendatang, yaitu diantaranya :

1. Peluang.
 - a. Dukungan kebijakan dari pemerintah (peraturan perundangan)
 - 1) Terdapatnya peraturan perundangan yang terkait dengan kesehatan diantaranya :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
 - c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Terdapatnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Terdapatnya komitmen global, nasional, regional yang menyakut kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan.
 - 1) Komitmen Global *Millenium Development Goal's* (MDGs) terdiri dari delapan point komitmen, lima diantaranya terkait langsung dengan kesehatan yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, upaya memerangi penyebaran terhadap penyakit (khususnya HIV/AIDS, Malaria, Tuberculosis dan penyakit lain) dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kemudian dilanjutkan dengan SDGs.
 - 2) Komitmen global terhadap dunia bebas penyakit polio. Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1988) mencanangkan program Eradikasi Polio (*The Global Polio Eradication Initiative*) yaitu pemusnahan polio dari bumi.
 - 3) Komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan pembangunan nasional dengan menggunakan konsep paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Maret 1999, sebagai Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
- c. Dukungan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, hal ini diwujudkan dengan berkembangnya kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang meliputi (Posyandu, Poskestren, Poliklinik Kesehatan Desa dll) dan pengembangan Desa Siaga.

2. Tantangan

Selain adanya beberapa peluang ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, yaitu :

- a. Adanya potensi bencana alam dan musibah masal.
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Batang yang terdiri dari perbukitan, dataran tinggi, hutan, laut dan kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik memunculkan potensi terjadinya bencana dan musibah masal.
- b. Kabupaten Batang yang terletak di jalur pantura merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa kota yang merupakan tempat peristirahatan para pengemudi, serta kota pelabuhan, kondisi ini sangat beresiko terhadap perkembangan kasus HIV/AIDS dan penyakit memular lainnya.
- c. Adanya daerah endemis dan penyakit potensial wabah.
Kabupaten Batang merupakan daerah endemis DBD, sehingga penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Batang masih menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat.
- d. Masih tingginya kasus gizi buruk (dengan indikator berat badan menurut tinggi badan), hal ini perlu mendapatkan perhatian.
- e. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka ini menunjukkan peningkatan dan masih di atas target renstra juga masih di atas Jawa Tengah.
- f. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) meskipun sudah menunjukkan penurunan, namun angka ini masih di atas angka Jawa Tengah.
- g. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.
Sebagai gambaran kualitas kesehatan lingkungan maka dapat dilihat dari cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan yang masih 57,90%.

- h. Masih banyaknya penduduk miskin.
Kemampuan ekonomi masyarakat Batang masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan/mengakses pelayanan kesehatan rujukan, sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah pengawasan tenaga kesehatan, sementara kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan juga belum baik.
- i. Semakin banyaknya perdagangan/peredaran makanan dan minuman dalam masyarakat, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.
- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
- k. Pandemi covid-19 yang belum mereda.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis kesehatan di Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBA).
2. Masih adanya kasus gizi kurang pada balita dan ibu hamil, hal ini berdampak pada angka kematian ibu dan bayi.
3. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular. Penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat. Penyakit-penyakit menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti diabetes melitus (DM), kardiovaskular dan kanker cenderung meningkat.
4. Adanya pandemi covid 19 yang belum berakhir.
5. Kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih dan proporsi rumah yang memenuhi syarat kesehatan masih di bawah angka Jawa Tengah.

6. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat masih belum optimal. Kebiasaan cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar belum membudaya dan kebiasaan merokok dimasyarakat masih tinggi, perilaku pemberian ASI eksklusif pada bayi masih rendah, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum membudaya.
7. Belum optimalnya penanganan kejadian luar biasa (KLB) termasuk bencana. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.
8. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal, kondisi antara lain disebabkan jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan belum memadai, seperti jumlah sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan pelayanan gawat darurat masih terbatas, jumlah puskesmas dengan rawat inap yang masih terbatas.
9. Partisipasi/peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal/masih rendah (posyandu, pemberantasan sarang nyamuk, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pengembangan desa siaga).
10. Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Batang, perlu dilaksanakan pengembangan jaminan kesehatan nasional, dengan melakukan advokasi dan sosialisasi untuk pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*.

Sistem perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan maupun kelengkapan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2023.

Sedangkan untuk Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Batang

No. Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	%	96	107.910.136.674	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinkes	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	96	107.910.136.674		
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dok	8	307.346.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8	307.346.500		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	41.385.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	41.385.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	2	208.701.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinkes	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	208.701.500		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	57.260.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4	57.260.000		

	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Dok	2	65.159.788.924	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2	65.159.788.924	
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bl	820	64.672.749.724	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	820	64.672.749.724	
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dok	1	480.850.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	480.850.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	3.094.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinkes	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	3.094.600	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	1	3.094.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dinkes	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1	3.094.600	
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	dokumen	14	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinkes	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	14	30.000.000	
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	org	15	30.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Dinkes	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15	30.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi,	paket	3	536.167.250	Administrasi Umum Perangkat	Dinkes	jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat	3	536.167.250	

			jumlah arsip yang dikelola				Daerah		koordinasi, jumlah arsip yang dikelola			
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	31.365.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinkes	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	31.365.000	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	131.397.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	131.397.250	
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	37.865.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinkes	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	37.865.000	
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	121.650.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinkes	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	121.650.000	
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	60.890.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinkes	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	60.890.000	
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dok	1	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Dinkes	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	3.000.000	
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	150.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	5	57.869.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinkes	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5	57,869,000	
		- Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	5	57.869.000	Pengadaan Mebel	Dinkes	Jumlah paket mebel yang	5	57,869,000	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jenis	6	669.455.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	6	669.455.000	
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	7.000.000	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	494.100.000	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	494.100.000	
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	35.555.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	35.555.000	
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	132.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinkes	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	132.800.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	54	1.052.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinkes	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	54	1.052.500.000	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	3	378.440.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinkes	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	378.440.000	
		- Pemeliharaan/Rehabili	Jumlah gedung	unit	1	548.000.000	Pemeliharaan	Dinkes	Jumlah gedung	1	548.000.000	

		tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	51.060.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	51.060.000	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Ha	0,1	75.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah	Dinkes	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	0,1	75.000.000	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Pusk	21	40,097,010,000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pusk	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21	40,097,010,000	
		- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah layanan puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Unit Kerja	21	40,097,010,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pusk	Jumlah layanan puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	21	40,097,010,000	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	53.736.889.092	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkes, Pusk	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	100	53.736.889.092	
			Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)	Per 100.000 Penduduk	22				Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)	22		
			CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).	Per 100.000 Penduduk	110				CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).	110		
			Angka penemuan kasus baru kusta	Per 100.000	4				Angka penemuan kasus baru kusta	4		

			(New Case Detection Rate/NCDR).	Penduduk					(New Case Detection Rate/NCDR).			
	-	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas terakreditasi	Unit	21	4.898.391.616	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Dinkes, Pusk	Jumlah puskesmas terakreditasi	21	4.898.391.616	
	-	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	unit	2	1.050.000.000	Pembangunan Puskesmas	Limpung Blado II	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	2	1.050.000.000	
	-	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	unit	1	200.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Labkesda	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	200.000.000	
	-	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	unit	1	100.000.000	Pengembangan Puskesmas	Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1	100.000.000	
	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terpeliharanya gedung puskesmas	Unit	2	500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas	Terpeliharanya gedung puskesmas	2	500.000.000	
	-	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya ambulan roda empat dan roda dua	unit	2	342.334.300	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Tersedianya ambulan roda empat dan roda dua	2	342.334.300	
	-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit	1	150.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1	150.000.000	
	-	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat	Jumlah alat kesehatan/alat	paket	1	560.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat	Dinkes, Pusk	Jumlah alat kesehatan/alat	1	560.000.000	

		Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			
		- Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket	4	1.825.557.316	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	4	1.825.557.316	
		- Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket	1	50.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1	50.000.000	
		- Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit	350	120.500.000	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Dinkes	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	350	120.500.000	
	-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah /Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	Pusk	21	48.642.997.476	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinkes, Pusk	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	21	48.642.997.476	
			Jumlah desa ODF	desa/keurahan	118				Jumlah desa ODF	118		
			Jumlah kasus kematian ibu	orang	20				Jumlah kasus kematian ibu	20		
			Jumlah kasus kematian bayi	bayi	106				Jumlah kasus kematian bayi	106		
			Jumlah kasus kematian balita	balita	118				Jumlah kasus kematian balita	118		
			Jumlah balita stunting	balita	5.600				Jumlah balita stunting	5.600		
			Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	orang	175				Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	175		
			Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	orang	920				Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	920		
			Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	orang	31				Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	31		

		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.100	2.065.048.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinkes, Pusk	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.100	2.065.048.000	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.900	634.434.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinkes, Pusk	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.900	634.434.000	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.800	157.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinkes, Pusk	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.800	157.400.000	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	34.711	1.443.834.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinkes, Pusk	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34.711	1.443.834.000	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	112.550	987.754.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinkes, Pusk	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	112.550	987.754.600	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	orang	555.121	1.106.448.750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinkes, Pusk	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	555.121	1.106.448.750	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	75.000	272.714.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinkes, Pusk	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75.000	272.714.500	

		- Pengelolaan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Penderita	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	212.409	233.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinkes, Pusk	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	212.409	233.750.000	
		- Pengelolaan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Penderita	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	10.379	222.915.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinkes, Pusk	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	10.379	222.915.000	
		- Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	1.839	128.602.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.839	128.602.500	
		- Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	4.100	102.870.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinkes, Pusk	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4.100	102.870.000	
		- Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	15.169	133.365.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	15.169	133.365.000	
		- Pengelolaan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	2.007.252.950	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	2.007.252.950	
		- Pengelolaan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	Dokumen	1	10.000.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	1	10.000.000	

			kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar				akibat bencana dan/berpotensi bencana		kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar			
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	1.905.000.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1	1.905.000.500	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Dokumen	1	457.009.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	1	457.009.500	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	1	1.872.966.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	1.872.966.500	
		- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	1	926.733.520	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1	926.733.520	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Dokumen	1	28.946.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	1	28.946.500	
		- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	1	1.613.421.180	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1	1.613.421.180	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	80	32.750.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinkes, Pusk	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80	32.750.000	
		- Pengelolaan Pelayanan	Jumlah	orang	2	36.725.000	Pengelolaan	Dinkes,	Jumlah	2	36.725.000	

		Kesehatan Jiwa dan NAPZA	penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan				Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pusk	penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
		- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Dokumen	1	1.015.750.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1	1.015.750.000	
		- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	1.366.216.700	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2	1.366.216.700	
		- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	1	23.433.863.976	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1	23.433.863.976	
		- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Paket	8	77.750.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pusk	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	8	77.750.000	
		- Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	1	3.099.673.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pusk	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	1	3.099.673.000	
		- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Dokumen	1	353.249.800	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes,	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1	353.249.800	
		- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	25	1.639.832.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinkes,	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	25	1.639.832.000	
		- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Jumlah laporan hasil investigasi awal	Laporan	2	198.600.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak	Dinkes, Pusk	Jumlah laporan hasil investigasi	2	198.600.000	

		(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
		- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Dokumen	1	119.710.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	1	119.710.000
		- Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	826.800.000			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) yang terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	826.800.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosa mendapatkan pelayanan	orang	1.738	97.050.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan Tuberkulosa mendapatkan pelayanan	1738	97.050.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV mendapatkan pelayanan	orang	260	28.350.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Dinkes, Pusk	Jumlah orang dengan HIV mendapatkan pelayanan	260	28.350.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah penderita malaria yang ditemukan dan ditangani	orang	1	6.210.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Dinkes, Pusk	Jumlah penderita malaria yang ditemukan dan ditangani	1	6.210.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	Dokumen	100	167.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	1	167.000.000
			Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2				Jumlah aplikasi yang dikelola	2	
		- Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi	Dokumen	1	75.000.000	Pengelolaan data dan informasi	Dinkes, Pusk	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi	1	75.000.000

			kesehatan				kesehatan		kesehatan			
		- Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	75.000.000	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1	75.000.000	
		- Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	unit	1	17.000.000	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Dinkes,	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	1	17.000.000	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Fasyankes yang berijin	Fasyankes	51	28.500.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah Fasyankes yang berijin	51	28.500.000	
		- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Unit	45	11.500.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Dinkes,	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	45	11.500.000	
		- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Unit	24	17.000.000	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Dinkes,	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	24	17.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	99,01	490.440.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Dinkes,	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	99,01	490.440.000	

						KESEHATAN					
	-	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	orang	610	251.990.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	610	251.990.000
			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	Orang	100				Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	100	
	-	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	dokumen	1	15.000.000	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1	15.000.000
	-	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	dokumen	1	236.990.000	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Dinkes	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	1	236.990.000
	-	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	dokumen	1	128.100.000	Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah dokumen rencana kebutuhan SDM	1	128.100.000
	-	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	dokumen	1	20.100.000	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	1	20.100.000
	-	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang	Orang	2.000	108.000.000	Pemenuhan kebutuhan sumber daya	Dinkes,	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang	2.000	108.000.000

			memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)				manusia kesehatan sesuai standar		memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)		
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	nakes	40	110.350.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Dinkes,	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	40	110.350.000
		- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat	Orang	40	110.350.000	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Dinkes,	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat	40	110.350.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	100	620.726.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinkes,	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	100	620.726.000
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek yang berijin	Surat Apotik	22	51.400.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes,	Jumlah Apotek yang berijin	22	51.400.000
			Jumlah Toko Obat yang berijin	Toko obat	4				Jumlah Toko Obat yang berijin	4	
			Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Toko alkes/optikas	13				Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	13	

		- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	125	17.900.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	125	17.900.000	
		- Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	125	33.500.000	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinkes,	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	125	33.500.000	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat	sertifikat	220	204.386.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	Dinkes,	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat	220	204.386.000	

							Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
		- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dokumen	70	204.386.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	70	204.386.000	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	TPM	420	44.500.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinkes,	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	420	44.500.000	
		- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikasi laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air	Jumlah produk dan sarana produksi makanan- minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut	Unit	75	44.500.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikasi laik higiene sanitasi	Dinkes,	Jumlah produk dan sarana produksi makanan- minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post	75	44.500.000	

		Minum (DAM)	pengawasan				Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)		market dalam rangka tindak lanjut pengawasan			
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	%	100	320.440.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes,	Persentase hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	100	320.440.000	
		- Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pemeriksaan laboratorium terakreditasi sampling dan pengujian PIRT	sampel	18	132.140.000	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Dinkes,	Pemeriksaan laboratorium terakreditasi sampling dan pengujian PIRT	18	132.140.000	
		- Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Tersedianya data perijinan PIRT	dok	1	188.300.000	Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Dinkes,	Tersedianya data perijinan PIRT	1	188.300.000	
		PROGRAM MASYARAKAT KESEHATAN	PEMBERDAYAAN BIDANG	Rasio posyandu mandiri terhadap balita	per 1000 balita	11,74	629.650.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Dinkes,	Rasio posyandu mandiri terhadap balita	11,74	629.650.000

						KESEHATAN					
		Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	Desa	30	75.000.000	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	30	75.000.000
		- Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	75.000.000	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	1	75.000.000
		Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	dokumen	2	328.750.000	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	2	328.750.000
		- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	dokumen	1	328.750.000	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1	328.750.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	posyandu	600	225.900.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dinkes,	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	600	225.900.000

							(UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota					
		- Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	225.900.000	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinkes,	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	225.900.000	
		JUMLAH				163.387.841.766					163.387.841.766	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat

Bahwa proses perencanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dimulai dari kegiatan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan musrenbang kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan kegiatan dari masyarakat, yang merupakan kondisi riil kebutuhan masyarakat.

Dari hasil proses tersebut dipadukan dengan dokumen renstra SKPD Dinas Kesehatan serta memperhatikan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan baik dari tingkat pusat, regional dan lokal.

Sedangkan untuk usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari dana aspirasi dewan tahun 2023 tidak ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni :

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, dengan sasaran strategis :
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dengan sasaran strategis :
Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan sasaran strategis :
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya kesehatan, dengan sasaran strategis:
 - a. Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.

- b. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
 - c. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Indikator sasaran strategis RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, adalah :

1. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup), sebesar 183.
2. Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), sebesar 16.
3. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek), pada balita (%) sebesar 14.
4. Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%), sebesar 7.
5. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV), sebesar 0,18.
6. Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk), sebesar 190
7. Eliminasi malaria (kabupaten/kota), sebesar 405.
8. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%), sebesar 8,7.
9. Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%), sebesar 21,8.
10. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 - 23 bulan (%), sebesar 90.
11. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%), sebesar 100.
12. Persentase rumah sakit terakreditasi (%), sebesar 100.

13. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%), sebesar 83.
14. Persentase puskesmas tanpa dokter (%), sebesar 0.
15. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%), sebesar 96.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator yang harus dicapai kabupaten/kota, yaitu :

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sebesar 100%.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 100%.
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.
4. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
6. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
8. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
9. Persentase penderita Diabetis Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
10. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%.
11. Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebesar 100%.

12. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deeksi dini HIV sesuai standar sebesar 100%.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan status kesehatan masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Hidup sebesar 74,09 tahun.

Sasarannya adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator :

- 1) Angka kematian ibu, sebesar 108 per 100.000 kelahiran hidup.
- 2) Angka kematian bayi, sebesar 11,30 per 1.000 kelahiran hidup.
- 3) Angka kematian balita, sebesar 10,45 per 1.000 kelahiran hidup.
- 4) Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebesar 57%
- 5) Persentase penemuan dan pelayanan kesehatan penderita PTM dan kesehatan jiwa sebesar 55%.
- 6) Persentase respon cepat pelayanan kesehatan < 24 jam dalam penanggulangan KLB/bencana sebesar 100%.
- 7) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan sebesar 51%.
- 8) Persentase capaian SPM RSUD dan RSJD Provinsi sebesar 37,14%.
- 9) Indek Keluarga Sehat Wilayah Provinsi sebesar 0,30%

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan, sasaran, kebijakan strategi, program dan kegiatan Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang

ditetapkan setelah penetapan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehan, maka untuk mewujudkan tujuan ke satu dari RPD yaitu “Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan” dengan Sasaran Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka Tujuan dari RENJA Dinas Kesehatan, yang merupakan tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 adalah

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang, dengan indikator Angka Harapan Hidup sebesar 74,84 tahun.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat sebesar 88,50% ..

Denagan sasaran meliputi :

1. Menurunnya Angka Kematian dan Meningkatnya status gizi Masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan Kesehatan, dengan indicator :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 160 per 100.000 kelahiran hidup.

- b. Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 8,48 per 1.000 kelahiran hidup.
 - c. Angka prevalensi balita stunting sebesar 13,87%
 - d. Persentase penduduk yang mempunyai jaminan Kesehatan sebesar 87%.
 - e. Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar sebesar 71,42%.
 - f. Persentase fasilitas kefarmasian yang sesuai standar sebesar 65%.
 - g. Persentase desa sisga aktif strata mandiri sebesar 10,48%.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sebesar 79%

Sedangkan untuk Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan sebagaimana dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang	Angka Harapan Hidup	74,84 Tahun	Menurunkan Angka Kematian dan Meningkatkan status gizi Masyarakat melalui peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	160 per 100.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan puskesmas
					Angka Kematian Bayi (AKB)	8,48 per 1.000 KH			Pembangunan fasilitas kesehatan lain
					Angka prevalensi balita stunting	13,87 %			Pengembangan puskesmas
					Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	87%			Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
									Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
									Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
									Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan

									Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi
									Pengadaan obat, vaksin
									Pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan
								Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kab/kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
									Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
									Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
									Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
									Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
									Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
									Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

									Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertens
									Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
									Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kKejadian Luar Biasa (KLB)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan
									Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
									Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga
									Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

									Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
									Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
									Pengelolaan surveilans kesehatan
									Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
									Pengelolaan upaya kesehatan khusus
									Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
									Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
									Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional

									Operasional pelayanan puskesmas
									Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
									Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
									Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
									Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
									Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
									Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
									Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria

								Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan data dan informasi kesehatan
									Pengelolaan sistem informasi kesehatan
									Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet
								Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
									Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
					Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar	71,42 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
									Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
								Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan

									Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
									Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
								Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota
					Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar	65 %	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
									Penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Pengawasan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
									Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
								Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut

								Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
								Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
								Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
								Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
									Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga
					Persentase Desa Sisga Aktif Strata Mandiri.	10,48 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

								Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
								Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kesehatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	88,5%	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
									Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
									Evaluasi kinerja perangkat daerah
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
									Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
									Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
									Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulanan /semesteran SKPD

								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan peralatan rumah tangga
									Penyediaan bahan logistik kantor
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
									Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan mebel
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat

									Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
									Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
									Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
									Pemeliharaan/rehabilitasi tanah
								Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain :
 - Pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Batang.
 - Pencapaian SDGs.
 - Pencapaian Stantdar Pemayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - Pencapaian program nasional dan regional.
- b. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 terdiri dari 5 program, 22 kegiatan dan 90 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran Rp. 163.387.841.766,- , bersumber dari :
 - Dana Alokasi Umum, sebesar Rp. 78.715.927.540,-
 - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, sebesar Rp.40.097.010.000,-
 - Dana DBHCHT, sebesar Rp. 848.000.000,-
 - Dana Pajak Rokok, sebesar, Rp. 17.500.000.000,-
 - Dana Insentif Daerah, sebesar Rp. 1.642.334.300,-
 - Dana Alokasi Khusus, sebesar Rp. 24.584.569.926,-
- c. Kesesuaian rancangan awal renja dengan rumusan program kegiatan, sub kegiatan.

Secara keseluruhan rancangan awal renja dengan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak ada beda.
- d. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023, sebagaimana dalam tabel 3.2

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja Dinas Kesehatan	%	96	107.910.136.674	DAU/BLUD		97	107.257.007.240
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dok	8	307.346.500	DAU		8	307.346.500
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	41.385.000	DAU		2	41.385.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	208.701.500	DAU		2	208.701.500
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	57.260.000	DAU		4	57.260.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Keuangan yang disusun	dok	2	65.159.788.924	DAU		2	64.634.404.490
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	820	64.672.749.724	DAU		820	64.147.365.290

	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	480.850.000	DAU		1	480.850.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1	3.094.600	DAU		1	3.094.600
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Dok	1	3.094.600	DAU		1	3.094.600
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SK kepegawaian yang diusulkan	dokumen	14	30.000.000	DAU		14	30.000.000
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-Undangan	org	15	30.000.000	DAU		15	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola	paket	3	536.167.250	DAU		3	536.167.250
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	31.365.000	DAU		1	31.365.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	131.397.250	DAU		1	131.397.250
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	1	37.865.000	DAU		1	37.865.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	121.650.000	DAU		1	121.650.000

	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	1	60.890.000	DAU		1	60.890.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	3	3.000.000	DAU		3	3.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	150.000.000	DAU		1	150.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	unit	5	57.869.000	DAU		5	57.869.000
	- Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	5	57.869.000	DAU		5	57.869.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	jenis	6	669.455.000	DAU		6	669.455.000
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	7.000.000	DAU		1	7.000.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	494.100.000	DAU		1	494.100.000
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	35.555.000	DAU		1	35.555.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	132.800.000	DAU		1	132.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	54	1.052.500.000	DAU		54	554.060.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	unit	3	378.440.000	DAU		3	78.000.000

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan pajaknya							
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	548.000.000	DAU		1	425.000.000
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	51.060.000	DAU		1	51.060.000
	- Pemeliharaan/rehabilitasi tanah	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	Ha	0,1	75.000.000			0	0
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang menerapkan PPK BLUD	Pusk	21	40.097.010.000	BLUD		21	40.467.705.000
	- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	21	40,097,010,000	BLUD		21	40.467.705.000
	PROGRAM UPAYA PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	53.736.889.092	DAU, DBHCHT, Pajak Rokok, DID, DAK		100	46.952.567.076
		<i>Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (incidence Rate/IR)</i>	<i>Per 100.000 Penduduk</i>	22				21	
		<i>CNR semua kasus Tuberculosis/TB (Case Notification Rate/CNR).</i>	<i>Per 100.000 Penduduk</i>	110				115	
		<i>Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection Rate/NCDR).</i>	<i>Per 100.000 Penduduk</i>	4				4,1	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	unit	21	4.898.391.616	DAU, DID, DAK,		21	4.997.777.400
	- Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	unit	2	1.050.000.000	DAU, DAK		1	1.050.000.000
	- Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	unit	1	200.000.000	DAK		0	0
	- Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana,	unit	1	100.000.000	DID		0	0

		prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar							
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	unit	2	500.000.000	DID		3	1.000.000.000
	- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	2	342.334.300	DID		3	600.000.000
	- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	1	150.000.000	DAU, DAK		4	400.000.000
	- Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	3	560.000.000	DAU, DAK		3	200.000.000
	- Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket	4	1.825.557.316	DAU, DID, DAK		4	1.477.277.400
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	paket	1	50.000.000	DAU		1	50.000.000
	- Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	350	120.500.000	DAK		371	220.500.000
	- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal	Pusk	21	48.642.997.476	DAU, DBHCHT, Pajak Rokok, DAK		21	41.765.499.676
		Jumlah Desa ODF	desa/ kelurahan	118				139	
		Jumlah kasus kematian ibu	orang	20				17	
		Jumlah kasus kematian bayi	bayi	106				101	
		Jumlah kasus kematian balita	balita	118				108	
		Jumlah balita stunting	balita	5.600				5.500	

			Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue	orang	175				170	
			Jumlah semua Kasus TB yang diobati dan dilaporkan (tercatat)	orang	920				960	
			Jumlah kasus baru kusta yang ditemukan	orang	31				33	
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	13.100	2.065.048.000	DAU, DAK		13.200	2.065.048.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.900	634.434.000	DAU, DAK		13.000	634.434.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	12.800	157.400.000	DAU, DAK		12.900	158.500.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	34.711	1.443.834.000	DAU, DAK		35.111	1.443.834.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	112.550	987.754.600	DAU, DAK		112.600	1.027.121.600
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	orang	555.121	1.106.448.750	DAU, DAK		580.354	1.106.448.750
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	75.000	272.714.500	DAU, DBHCHT, DAK		80.000	272.804.500
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	212.409	233.750.000	DAU, DAK		212.515	233.750.000
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	10.379	222.915.000	DAU, DAK		10.430	222.915.000

	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	orang	1.839	128.602.500	DAU, DAK		1.853	128.602.500
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	orang	4.100	102.870.000	DAU, DAK		4.200	195.070.000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	orang	15.169	133.365.000	DAU, DAK		15.257	160.965.000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	2.007.252.950	DAU, DAK		1	2.036.682.950
	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/berpotensi bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	1	10.000.000	DAU		1	10.000.000
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	1.905.000.500	DAU, DAK		1	1.454.734.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Dokumen	1	457.009.500	DAU, DAK		1	457.009.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	1	1.872.966.500	DAU, DAK		1	1.872.966.500
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	1	926.733.520	DAU, DAK		1	671.733.520
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional,	Dokumen	1	28.946.500	DAU		1	28.946.500

	Mandiri, dan Tradisional Lainnya	akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya							
	- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	1	1.613.421.180	DAU, DAK		1	1.613.421.180
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	80	32.750.000	DAU, DAK		100	32.750.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	2	36.725.000	DAU, DAK		4	36.725.000
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	Dokumen	1	1.015.750.000	DAU, DAK		1	774.450.000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	2	1.366.216.700	DAU, DAK		2	1.422.076.700
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	1	23.433.863.976	DAU, DBHCHT, Pajak Rokok		1	18.474.863.976
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	Paket	8	77.750.000	DAU, DAK		8	77.750.000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	21	3.099.673.000	DAK		21	3.099.673.000
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Dokumen	6	353.249.800	DAU, DAK		6	353.249.800
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	25	1.639.832.000	DAU, DAK		27	1.524.832.000

	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Laporan	2	198.600.000	DAU, DAK		2	282.275.000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Dokumen	1	119.710.000	DID, DAK		1	119.710.000
	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	826.800.000	DAU		1	826.800.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan	orang	1.738	97.050.000	DAU,DAK		1.736	4.350.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV mendapatkan pelayanan	orang	260	28.350.000	DAU, DAK		270	27.850.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah penderita malaria yang ditemukan dan ditangani	orang	1	6.210.000	DAU,DAK		1	6.210.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen profil kesehatan Kab Batang	dok	1	167.000.000	DAU		1	167.000.000
		Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2				2	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	Dokumen	1	75.000.000	DAU		1	75.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Dokumen	1	75.000.000	DAU		1	75.000.000
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	Unit	1	17.000.000	DAU		1	17.000.000

	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang berijin	Fasyankes	51	28.500.000	DAU		54	28.500.000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	Unit	45	11.500.000	DAU		45	11.500.000
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasyankes yang dimonitor	Unit	24	17.000.000	DAU		24	17.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	99,01	490.440.000	DAU		99,34	293.800.000
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan surat ijin	orang	610	251.990.000	DAU		680	55.350.000
		Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pembinaan teknis praktek tenaga kesehatan.	Orang	100				130	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Dokumen	1	15.000.000	DAU		1	15.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Dokumen	1	236.990.000			1	40.350.000
	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah dokumen	dokumen	1	128.100.000	DAU		1	128.100.000

	dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	rencana kebutuhan SDMK							
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Dokumen	1	20.100.000	DAU		1	20.100.000
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	Orang	2.000	108.000.000	DAU		2.020	108.000.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nakes yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	nakes	40	110.350.000	DAU		40	110.350.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Orang	40	110.350.000	DAU		40	110.350.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	100	620.726.000	DAU,DAK		100	620.726.000
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek yang berijin	Apotik	72	51.400.000	DAU,DAK		73	51.400.000
		Jumlah Toko Obat yang berijin	Toko obat	4				4	
		Jumlah Toko Alat Kesehatan dan Optikal yang berijin	Toko alkes/optikas	13				13	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	125	17.900.000	DAU		127	17.900.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	125	33.500.000	DAU		127	33.500.000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang mendapat sertifikat	sertifikat	220	204.386.000	DAU,DAK		220	204.386.000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dokumen	70	204.386.000	DAU,DAK		70	204.386.000

	Rumah Tangga								
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memenuhi syarat kesehatan	TPM	420	44.500.000	DAU		440	44.500.000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	44.500.000	DAU		1	44.500.000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah hasil pengujian laboratorium PIRT tidak mengandung bahan berbahaya.	PIRT	28	320.440.000	DAU, DAK		30	320.440.000
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Unit	75	132.140.000	DAU, DAK		76	132.140.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah data perizinan industri rumah tangga yang dikelola dalam rangka tindak lanjut pengawasan	Dokumen	1	188.300.000	DAU, DAK		1	188.300.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rasio Posyandu Mandiri	per 1000	11,74	629.650.000	DAU, DAK		12,24	629.650.000

MASYARAKAT KESEHATAN	BIDANG	<i>terhadap balita</i>	<i>balita</i>						
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah desa siaga aktif strata mandiri	Desa	30	75.000.000	DAU		32	75.000.000
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	dokumen	1	75.000.000	DAU		1	75.000.000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tatanan PHBS yang dipetakan	dokumen	2	328.750.000	DAU, DAK		2	328.750.000
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Dokumen	1	328.750.000	DAU, DAK		1	328.750.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu Strata Mandiri	posyandu	600	225.900.000	DAU, DAK		650	225.900.000
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	225.900.000	DAU, DAK		1	225.900.000
	TOTAL ANGGARAN				163.387.841.766				155.753.758.316

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun berdasarkan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan adalah :

1. Perwujudan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Batang khususnya dalam bidang kesehatan.
4. Pelaksanaan program prioritas kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran prioritas pembangunan daerah, program kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Kesehatan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Kesehatan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

B. Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Batang, Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG

dr. Didiet Wisnuhardanto

Pembina Utama Muda

NIP. 19730619 200604 1 013